Briefing 9

Inisiatif Terpercaya

Pelajaran dari Inisiatif Terpercaya

Gambaran Umum

Terpercaya adalah sistem inklusif, sah, dan berlaku secara nasional yang melacak minyak sawit berkelanjutan serta mendefinisikan keberlanjutan pada tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Diampu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan dukungan dari Uni Eropa (UE), Terpercaya mengacu kepada undang-undang nasional, mencerminkan komitmen internasional, dan melengkapi sertifikasi keberlanjutan yang ada.

Sistem ini berkembang dari study yang didanai Uni Eropa untuk memantau kinerja keberlanjutan pada tingkat yurisdiksi dalam produksi komoditas di Indonesia—diluncurkan pada April 2018 dan dipimpin oleh European Forest Institute (EFI) dan Inovasi Bumi (INOBU)—hingga menjadi landasan proyek Keberlanjutan Sawit Malaysia dan Indonesia (KAMI). Diluncurkan pada tahun 2020, KAMI bertujuan untuk memperkuat kemitraan UE-Indonesia dan UE-Malaysia dengan mendukung proses nasional dan dialog internasional tentang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan fokus pada kelapa sawit.

Briefing ini menguraikan pengembangan Terpercaya dan menyajikan gambaran pembelajaran yang dipetik sejak sistem terbentuk pada awal pada Januari 2018 hingga Maret 2021.

Terpercaya: pendekatan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah

Terpercaya berangkat dari premis bahwa yurisdiksi tingkat daerah memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan produsen komoditas pertanian untuk mewujudkan produksi yang berkelanjutan dan memperoleh sertifikasi. Saat ini, sertifikasi adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan keberlanjutan dalam rantai pasok. Sistem Terpercaya diusulkan sebagai cara yang efektif untuk mengukur kinerja kabupaten dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh produsen, petani, dan pemegang konsesi dalam proses menuju praktik berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini meliputi pemenuhan prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh skema sertifikasi minyak sawit, pemenuhan biaya sertifikasi (khususnya untuk petani kecil), dan deforestasi di luar area produksi minyak sawit. Mengukur kinerja keberlanjutan di tingkat yurisdiksi dapat mempercepat perluasan dampak, mendorong upaya untuk menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, dan membantu memastikan pelibatan petani kecil dan masyarakat adat.

Pada fase pertamanya (2018–2019), Inisiatif Terpercaya menetapkan 22 indikator keberlanjutan yurisdiksi melalui proses multipihak dengan tujuan mengukur produksi komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten (Tabel 1). Indikator terpilih mengacu kepada hukum dan peraturan Indonesia dan dapat dikelompokkan ke dalam pilar lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Indikator-indikator ini menawarkan pendekatan yang saling menguntungkan bagi para pelaku di seluruh rantai pasok di negara produsen dan konsumen.

Gambar 1. Indikator Terpercaya. Sumber: Inisiatif Terpercaya

* Standar Indonesian Sustainable Palm Oil dan Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Pemilihan indikator

Keduapuluh dua indikator tersebut mencerminkan kepentingan dan tujuan dari beragam pelaku dan kelompok pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam Komite Penasihat Terpercaya. Didirikan setelah peluncuran Terpercaya, Komite Penasihat memiliki struktur keanggotaan terbuka, dan siapa pun yang tertarik dengan produksi komoditas berkelanjutan dapat bergabung. Partisipasi dalam pertemuan didasarkan pada undangan yang didistribusikan secara luas.

Dalam kurun 12 bulan setelahnya, terselenggara tiga pertemuan Komite Penasihat dan beberapa diskusi kelompok terfokus untuk menetapkan indikator. Proses seleksi mengambil pendekatan multipihak dan *bottom-up* untuk memastikan setiap indikator mencerminkan realitas produksi minyak sawit dan keberlanjutan pada tingkat kabupaten sekaligus memastikan keselarasan indikator dengan komitmen internasional, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. Proses ini didukung oleh analisis undang-undang dan peraturan yang relevan serta standar keberlanjutan, bersama dengan wawancara dengan pemangku kepentingan. Pemilihan indikator mempertimbangkan prinsip-prinsip dan kriteria keberlanjutan yang terkandung di dalam skema sertifikasi keberlanjutan, termasuk standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan indikator keberlanjutan yurisdiksi:

- **Legalitas:** indikator harus selaras dengan kerangka hukum dan kebijakan; indikator mengacu kepada prioritas nasional dan tidak menciptakan sistem baru serta beban tambahan.
- **Legitimasi:** indikator harus dikembangkan melalui konsultasi multipihak untuk memastikan relevansinya dengan kelompok sasaran utama: Pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, sektor swasta, mitra dagang, masyarakat sipil, dan konsumen. Agar kredibel, indikator harus menggunakan data yang objektif dan dapat diverifikasi secara independen.
- **Skala:** indikator harus sesuai untuk mengukur keberlanjutan di semua yurisdiksi lokal. Ketersediaan data untuk pelacakan secara teratur dan metode pengumpulan data yang efisien harus menjadi pertimbangan utama.
- **Keuntungan bersama:** indikator harus selaras dengan SDG untuk mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh negara produsen dan konsumen.
- **Daya dukung:** indikator hasil ('baik') dan proses ('kemajuan') harus digabungkan agar dapat menjadi dasar yang mendorong pencapaian kemajuan secara bertahap dan bukan kategorisasi hasil (*outcome*) pada waktu tertentu.
- **Pelengkap:** indikator harus melengkapi sertifikasi keberlanjutan berbasis produk dengan mencakup seluruh yurisdiksi, yaitu semua kawasan hutan dan semua produsen, termasuk petani kecil.

Petani sawit dan pekerja sedang beristirahat

Foto: Icaro Cooke Vieira, CIFOR

Pengumpulan data

Indikator di atas digunakan sebagai dasar pengumpulan data untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten. Sejak akhir tahun 2019, tim studi melakukan penelitian terhadap kumpulan data nasional yang sesuai untuk skrining menyeluruh terhadap semua kabupaten di Indonesia (lihat Lampiran 1). Namun, set data tidak tersedia untuk setidaknya empat indikator, seperti: i) pengendalian pencemaran air dan udara (indikator 7); ii) persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dalam permohonan izin perkebunan (indikator 8); iii) partisipasi multipihak dalam perencanaan kabupaten (indikator 20); dan iv) mekanisme pengaduan (indikator 21). Dua indikator, yaitu akses informasi publik (indikator 19) dan perencanaan tata guna lahan berkelanjutan (indikator 22), diberikan label 'tersedia dengan catatan khusus'. Terdapat dua (sub)indikator lainnya yang diberi label sebagai 'tersedia sebagian': perencanaan tata ruang (yang berkontribusi pada indikator 1, 2 dan 4) dan registrasi petani (yang berkontribusi pada indikator 12). Artinya, set data nasional tersedia tetapi tidak dalam format yang mudah digunakan atau dianalisis. Data perencanaan tata ruang, misalnya, tersedia dalam format dokumen yang dapat dipindahkan tetapi tidak dalam format *shapefile*. Selain itu, belum semua kabupaten menyerahkan data registrasi petani ke Pemerintah pusat, meskipun data ini tersedia di tingkat kabupaten.

Akses terhadap informasi

Inobu dan EFI telah mengembangkan platform data yang mudah digunakan sehingga para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi Terpercaya. Tujuannya adalah untuk membuat alat dan fungsi berbagi informasi penilaian kabupaten untuk menunjukkan potensi sistem. Pemangku kepentingan diajak menyarankan perbaikan pada platform ini, termasuk terhadap fitur-fitur berikut:

- **Penilaian kabupaten:** platform harus mencakup penilaian berdasarkan ambang batas indikator yang disepakati di antara para pemangku kepentingan.
- **Keterhubungan antara basis data:** setelah format data untuk setiap indikator disetujui, platform harus terhubung ke basis data yang beris data dari tahun-tahun berbeda. Platform juga dilengkapi antarmuka agar pengguna dapat memasukkan data.
- ***Crowdsourcing:*** banyak pemangku kepentingan telah menyarankan bahwa platform harus memiliki fungsi untuk menerima data publik sebagai pelengkap data Pemerintah.

Integrasi ke dalam sistem Pemerintah

Sistem Terpercaya dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah nasional di masa depan, termasuk perencanaan dan penganggaran pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan informasi dari sistem Terpercaya untuk melakukan penilaian mandiri saat merumuskan rencana pembangunan dan mengalokasikan anggaran. Setelah sistem Terpercaya dilembagakan, data-data terkait indikator dapat dikumpulkan berdasarkan mandat peraturan dan diperbarui secara berkala.

Diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri RI telah dilakukan dalam rangka mengarusutamakan Terpercaya melalui Permendagri 86/2017 dan 18/2020—masing-masing tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mengingat revisi peraturan membutuhkan waktu, Kementerian dapat mengawali pengarusutamaan dengan mengeluarkan surat edaran untuk menyosialisasikan indikator Terpercaya kepada kabupaten-kabupaten. Selain itu, indikator Terpercaya telah dipertimbangkan oleh BAPPENAS sebagai cara untuk memilih kabupaten prioritas sebagai penerima hibah khusus ketahanan pangan, yang dapat mendukung pengumpulan data terkait peluang program ketahanan pangan berbasis masyarakat. Diskusi tentang penciptaan insentif fiskal bagi pemerintah daerah untuk mengumpulkan data Terpercaya juga dapat mengarah pada penggunaan informasi Terpercaya secara lebih lanjut.

Pelajaran dari proses Terpercaya

Inisiatif Terpercaya menunjukkan bahwa membangun konsensus tentang indikator untuk mengukur keberlanjutan di tingkat yurisdiksi dapat dilakukan. Namun, saat ini tersedia begitu banyak platform pemantauan keberlanjutan sehingga menyebabkan 'kejenuhan platform' di kalangan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sistem Terpercaya harus mampu memberikan manfaat yang bermakna bagi produsen dan pembeli komoditas. Sistem Terpercaya juga perlu membedakan dirinya sebagai sarana yang efektif untuk mencapai transisi keberlanjutan.

Sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, Terpercaya menangkap kompleksitas dan keragaman regional produksi minyak sawit di seluruh Indonesia untuk mengomunikasikan keberlanjutan tingkat kabupaten secara andal, terutama ke pasar UE. Selain itu, mengingat perkembangan Terpercaya sebagai kolaborasi Indonesia-Uni Eropa, sistem ini memberikan peluang untuk memberikan informasi di tingkat yurisdiksi dalam konteks antisipasi peraturan Uni Eropa tentang komoditas yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai sistem berbiaya rendah yang memanfaatkan *big data* sekaligus sumber daya manusia yang minimal, Terpercaya dapat menghadirkan cara yang efisien untuk memberikan acuan perdagangan komoditas pertanian yang legal dan berkelanjutan.

Mengumpulkan buah kelapa sawit yang lepas

Foto: Icaro Cooke Vieira, CIFOR

Indikator Terpercaya mewakili kompromi yang andal dan disepakati secara luas, berdasarkan hukum dan peraturan Indonesia, ekspektasi internasional (sebagaimana diatur dalam kerangka kerja terkait keberlanjutan internasional dan sertifikasi komoditas), dan ketersediaan data. Cakupan indikator yang luas membantu menunjukkan kemajuan di berbagai bidang utama. Sebagai contoh adalah indikator 1, 2, 4, dan 6 yang mencerminkan kemajuan dalam perlindungan hutan dan lahan gambut. Ada pula indikator tentang persyaratan hukum terkait penghormatan hak masyarakat adat (indikator 9), registrasi petani (indikator 12), dan penanganan pengaduan (indikator 21). Sertifikasi keberlanjutan tingkat tinggi (seperti yang ditunjukkan oleh indikator 16) menunjukkan kinerja yang baik dalam hal kepatuhan hukum dan kinerja sosial. Indikator lainnya, seperti indikator 13 tentang produktivitas petani, dan indikator 14 dan 15 tentang kelompok tani dan dukungan petani, mencerminkan kesejahteraan petani kecil. Selanjutnya, berbagai indikator tata kelola memungkinkan dukungan tingkat yang lebih tinggi untuk melacak keberlanjutan.

Truk mengumpulkan dan mengangkut tandan buah segar

Foto: Icaro Cooke Vieira, CIFOR

Bagian berikut menguraikan bidang-bidang utama lainnya yang memberikan pelajaran penting selama pembentukan Terpercaya.

Proses multipihak

Keterlibatan multipihak sejak awal merupakan komponen utama dari proses Terpercaya. Berbagai kelompok pemangku kepentingan dari Pemerintah (termasuk kementerian dan lembaga), sektor swasta (termasuk produsen dan pembeli) dan organisasi masyarakat sipil (termasuk organisasi petani dan masyarakat adat, serta lembaga sertifikasi komoditas) secara luas terwakili di Komite Penasihat. Terdapat empat pertemuan Komite Penasihat pada fase pertama (2018–2019) dan lima pertemuan pada fase kedua (2019–2021). Diselenggarakan oleh BAPPENAS, pertemuan Komite Penasihat dihadiri oleh total 63 organisasi selama keseluruhan proses, meskipun tidak semua organisasi menghadiri semua pertemuan. Rata-rata rapat memiliki komposisi peserta sebagai berikut: instansi pemerintah (32%); produsen dan pembeli komoditas (16%); dan organisasi non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat adat dan lembaga sertifikasi sukarela (52%).

Terdapat empat kabupaten yang hadir dalam pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut: Rokan Hulu di Provinsi Riau; Kotawaringin Barat dan Seruyan di Kalimantan Tengah; dan Morowali Utara di Sulawesi Tengah. Setiap pemerintah kabupaten dikonsultasikan secara menyeluruh, termasuk melalui wawancara tatap muka dengan pejabat kabupaten dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di setiap kabupaten. Pendapat pemerintah kabupaten juga disumbangkan oleh anggota Komite Penasihat, termasuk Lingkar Temu Kabupaten Lestari – konsorsium 10 kabupaten di Indonesia yang berkomitmen untuk keberlanjutan – dan Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi internal, termasuk untuk provinsi dan kabupaten. pemerintah.

Proses multipihak memiliki elemen kunci yang memberikan sejumlah keunggulan:

- **Keterlibatan awal dan representasi luas:** dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam sejak awal proses, maka perbedaan dan pertentangan kepentingan dapat diungkapkan dan diselesaikan saat memilih dan merancang indikator.
- **Mendukung pemangku kepentingan untuk mengambil inisiatif:** mengakomodasi kepentingan para pihak dalam pilihan dan desain indikator dan platform data turut menciptakan rasa kepemilikan dan legitimasi. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas sistem dan memastikan promosinya oleh para pemangku kepentingan yang terlibat.

Proses Terpercaya dimulai secara informal, namun formalisasi lebih jauh menjadi perlu seiring dengan semakin diterimanya sistem ini. Beberapa opsi untuk meningkatkan formalitas proses telah diidentifikasi. Pertama, diusulkan agar dibentuk struktur tata kelola yang mencakup, misalnya, komite penasihat pusat atau komite tetap, bersama dengan beberapa kelompok kerja dengan fungsi teknis. Kedua, perlu ada struktur standar dan prosedur operasional sebagai dasar pemberian nasihat dan agar dialog tentang keberlanjutan dapat dikembangkan. Usulan ini akan memungkinkan organisasi yang berpartisipasi untuk memperkuat keterwakilannya di pertemuan dan memastikan pelaporan kembali. Langkah-langkah tersebut dapat memperkuat inisiatif dan mendukung implementasi yang lebih luas dari upaya untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama.

Kepemimpinan pemerintah

Meskipun dikembangkan melalui proses multipihak, Terpercaya adalah inisiatif yang dipimpin oleh Pemerintah. Tidak seperti standar lain yang bersifat sukarela, Terpercaya perlu memastikan keterlibatan dari dan penerimaan oleh pemangku kepentingan Pemerintah di berbagai sektor untuk menciptakan lingkungan kebijakan dan peraturan. Tujuannya adalah agar keberlanjutan dapat diwujudkan dalam semua aspek yang ditentukan pada tingkat yurisdiksi: ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Indikator Terpercaya terkait dengan instrumen dan kebijakan peraturan Pemerintah yang selaras dengan SDGs, Kontribusi Nasional Indonesia berdasarkan Perjanjian Paris, dan prinsip dan kriteria skema sertifikasi. Oleh karena itu, sistem Terpercaya dapat memperkuat proses nasional lainnya yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dalam produksi minyak sawit, seperti ISPO dan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Hubungan dengan Pemerintah dibutuhkan untuk mendorong perubahan yang diperlukan di tingkat nasional dan daerah untuk memfasilitasi produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, kerangka hukum dan peraturan tidak hanya menentukan kegiatan yang diizinkan dan dilarang serta tujuan kebijakan yang diinginkan di tingkat daerah, tetapi juga ruang lingkup kegiatan yang mungkin didanai melalui sumber-sumber pendapatan yang tersedia.

Kontinuitas dan efektivitas sistem Terpercaya (dan sistem serupa lainnya) akan ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini termasuk: seberapa efektif sistem didukung dan diperkuat oleh peraturan yang mendukung fungsi-fungsi penting (seperti pengumpulan data); kerja sama antarinstansi Pemerintah; dan manfaat terhadap capaian sosial, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola. Terakhir, sistem mungkin didukung utamanya oleh pasar sebagai sarana yang dapat dijustifikasi secara ekonomi untuk mempromosikan perdagangan produk-produk yang dihasilkan secara berkelanjutan.

Ketersediaan data

Ketersediaan data yang akurat dan terkini merupakan kunci penentu keberhasilan Terpercaya. Untuk menghindari biaya yang berlebihan, pendataan di tingkat kabupaten harus dilakukan melalui instansi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik, dan melalui mekanisme pelaporan internal instansi teknis. Kerja sama diperlukan untuk mengumpulkan, menyusun, dan berbagi data yang diperlukan untuk memantau kinerja terhadap indikator sistem.

Jika data tidak tersedia untuk suatu indikator, maka dapat dipilih indikator serupa yang memiliki data sebagai indikator alternatif. Jika data tersedia di tingkat kabupaten tetapi tidak dilaporkan ke Pemerintah pusat, mekanisme untuk mengumpulkan data melalui proses pelaporan Pemerintah secara berkala harus dibuat. Jika pengumpulan data bergantung pada inisiatif yang sporadis, sukarela atau berbasis proyek, sangat mungkin data tidak akan dikumpulkan di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu dicari sumber data alternatif, atau indikator alternatif. Data yang dikumpulkan melalui jenis inisiatif ini – atau *crowdsourced* – juga dapat digunakan untuk pemeriksaan silang dan evaluasi. Oleh karena itu, kapabilitas yang relevan dapat diintegrasikan ke dalam platform data Terpercaya.

Petani kecil mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit

Foto: Icaro Cooke Vieira, CIFOR

Penilaian terhadap kabupaten

Untuk mengomunikasikan kemajuan kabupaten menuju keberlanjutan dengan lebih baik, pemangku kepentingan harus menyepakati ambang batas untuk setiap indikator berdasarkan peraturan, informasi ilmiah, dan informasi objektif tentang definisi keberlanjutan. Saat ini, platform data Terpercaya dilengkapi perangkat agar pengguna dapat menetapkan ambang batasnya sendiri; perangkat ini dibuat untuk menggambarkan kemampuan sistem. Pemangku kepentingan telah menyatakan minatnya terhadap sistem penilaian kabupaten untuk membantu perusahaan dalam keputusan pembelian mereka. Sistem seperti ini juga dapat membantu kabupaten mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperhatikan. Namun, sistem harus selalu transparan dan didukung secara luas untuk menghindari risiko penilaian yang bias dan untuk mencegah *trade-off* di antara elemen-elemen keberlanjutan yang berbeda. Hal-hal ini dapat menghilangkan insentif bagi sebuah kabupaten untuk mencapai keberlanjutan di semua dimensinya.

Akuntabilitas, jaminan, dan klaim

Agar sistem Terpercaya dapat diterima dan digunakan, sistem perlu dianggap kredibel oleh perusahaan dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, elemen tambahan perlu dipertimbangkan:

- Sistem ketertelusuran yang dapat diverifikasi dan dapat diakses harus memberikan informasi yang jelas tentang asal produk dan turunannya sehingga memastikan kredibilitas klaim tentang keberlanjutan dan inklusivitas produksi komoditas.
- Mekanisme audit dan verifikasi data yang digunakan dalam pemantauan yurisdiksi dan sistem ketertelusuran rantai pasok diperlukan untuk meyakinkan pengguna dan pihak ketiga bahwa sistem Terpercaya adalah sistem yang kredibel. Sebagai sistem nasional, metode pengambilan sampel dapat dipertimbangkan; auditor yang kredibel atau badan verifikasi, organisasi masyarakat sipil, dan peneliti dapat meninjau dan menyarankan perbaikan pada desain dan pengoperasian sistem.
- Sebagai sistem nasional yang bekerja di tingkat kabupaten, Terpercaya harus memungkinkan identifikasi produsen individu, pabrik atau petani kecil, dan mengumpulkan informasi tentang kinerja mereka dalam kaitannya dengan standar sosial dan lingkungan. Hal ini akan memungkinkan penerapan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa produsen yang berkinerja baik di kabupaten yang berkinerja buruk – dan produsen yang berkinerja buruk di kabupaten yang berkinerja baik – diperlakukan dengan benar. Produsen berkinerja baik yang disertifikasi menurut standar yang diterima, misalnya, dapat diizinkan untuk terus menggunakan sertifikasi mereka sebagai bukti kepada pembeli, sementara tindakan perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan kinerja produsen yang berkinerja buruk. Untuk mencapai tingkat fungsionalitas ini, kabupaten dapat mengembangkan daftar produsen, petani kecil, pabrik kelapa sawit, dan kilang kelapa sawit di dalam kabupaten mereka, dan mengumpulkan informasi tentang kinerja mereka terhadap standar lingkungan dan sosial.

Lampiran 1. Daftar kumpulan set data yang tersedia untuk 22 indikator Terpercaya

No.	Indikator	Tahun	Data yang dibutuhkan	Basis data nasional
1.	Perlindungan hutan permanen	2019	Peta moratorium	Tersedia
			Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedia sebagian
			Area hutan negara	Tersedia
2.	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi	2019	Kawasan esensial ekosistem yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Tersedia
			Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedia sebagian
			Kawasan dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi	Tersedia
			Area dengan nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi dari perusahaan anggota RSPO	Tidak tersedia
			Inisiatif masyarakat tentang konservasi	Tidak tersedia
3.	Pencegahan kebakaran	2018–2019	Area yang terbakar	Tersedia
4.	Perlindungan lahan gambut	2019	Peta moratorium	Tersedia
			Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedia sebagian
			Peta unit hidrologis lahan gambut	Tersedia
5.	Mitigasi perubahan iklim		Tingkat Rujukan Emisi Hutan (FREL)	Tidak tersedia di tingkat kabupaten. Indikator *proxy* dapat dikonsultasikan dengan KLHK beserta pembuatan metodologi baru untuk menurunkan target FREL dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten
			Tingkat deforestasi (%)	Tersedia dari analisis tutupan lahan
6.	Hutan produksi dikelola secara berkelanjutan	Hingga 2020	Konsesi kayu	Tersedia
			Daftar hutan yang disertifikasi oleh Forest Stewardship Council	Tidak tersedia
			Daftar hutan yang disertifikasi sesuai sertifikasi wajib Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	Tersedia
7.	Pengendalian polusi air dan udara	Tidak ada data	Statistik lingkungan regional	Tidak tersedia di tingkat kabupaten

No.	Indikator	Tahun	Data yang dibutuhkan	Basis data nasional
8.	Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC)	Hingga 2020	Formulir FPIC dalam permohonan izin perkebunan	Tidak tersedia
9.	Pengakuan hak adat	Hingga 2019	Peta indikatif perhutanan sosial	Tersedia
			Perda tentang hak atas tanah masyarakat adat	Tidak tersedia. Indikator proxy adalah menggunakan peta indikatif KLHK untuk tanah adat
			Database tanah adat dari lembaga swadaya masyarakat	Tersedia
10.	Resolusi konflik	2019	Jumlah Konflik	Tersedia
11.	Bagian untuk petani kecil	2018	1. Statistik Tanaman Perkebunan untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tersedia
			2. Statistik Kelapa Sawit	Tersedia
12.	Registrasi petani kecil	Hingga 2019	1. Statistik Tanaman Perkebunan untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tersedia
			2. Statistik Kelapa Sawit	Tersedia
			3. Data registrasi petani	Tersedia sebagian
13.	Produktivitas petani kecil	2018	1. Statistik Tanaman Perkebunan untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tersedia
			2. Statistik Kelapa Sawit	Tersedia
14	Organisasi petani kecil	Hingga 2020	1. Koperasi atau kelompok/asosiasi petani yang terdaftar	Tersedia
			2. Statistik Tanaman Perkebunan untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tersedia
			3. Statistik Kelapa Sawit	Tersedia
15.	Dukungan untuk petani kecil	Hingga 2020	1. Statistik Tanaman Perkebunan untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tersedia
			2. Statistik Kelapa Sawit	Tersedia
			3. Jumlah petugas penyuluhan	Tersedia
16.	Industri yang bertanggung jawab	Hingga 2019	1. Petani kecil bersertifikat RSPO	Tersedia
			2. Petani kecil bersertifikat ISPO	Tersedia
			3. Statistik Tanaman Perkebunan untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tersedia
			4. Statistik Kelapa Sawit	Tersedia

No.	Indikator	Tahun	Data yang dibutuhkan	Basis data nasional
17.	Lapangan pekerjaan pedesaan	2019	1. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan	Tersedia
			2. Jumlah penduduk menurut wilayah	Tersedia
18.	Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan	2018	Alokasi anggaran tahunan Pemerintah di tingkat kabupaten	Tersedia
19.	Akses informasi publik	Hingga 2020	Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat penerangan. Sebagai *proxy*, informasi berikut dapat dikumpulkan: a. SOP pelayanan informasi publik b. Daftar informasi publik c. Hasil pemantauan dan evaluasi Komisi Informasi	Tersedia dengan catatan khusus
20.	Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten	Hingga 2020	Daftar SOP terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah serta rencana kerja pemerintah daerah	Tidak tersedia. Pilihan lainnya adalah meminta pemerintah kabupaten untuk menyerahkan Berita Acara Kesepakatan yang dihasilkan selama proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana kerja pemerintah kabupaten, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
21.	Mekanisme pengaduan	2019	Daftar lengkap mekanisme pengaduan, termasuk pengumpulan dan penyelesaian pengaduan masyarakat	Tidak tersedia. Pilihan lainnya adalah meminta pemerintah kabupaten untuk mengisi survei (disiapkan oleh Komisi Informasi Provinsi) yang mengukur kualitas akses informasi di yurisdiksinya
22.	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan	Hingga 2020	Dokumen Penilaian Daya Dukung Lingkungan dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Tersedia dengan catatan khusus. KLHK saat ini sedang mengembangkan platform untuk melakukan analisis secara daring. Setelah sistem itu dikembangkan dengan baik, sistem dapat digunakan sebagai sumber data

Foto sampul: Pertemuan Komite Penasihat Terpercaya, Februari 2020. Foto: Inobu.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi info.terpercaya@efi.int

---

Penafian

Briefing ini dikembangkan oleh Inovasi Bumi (INOBU) dan European Forest Institute (EFI), dengan dukungan dari EU REDD Facility. Isi briefing ini adalah tanggung jawab penulis dan tidak dapat dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

November 2021.